

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi sekarang ini perkembangan dunia bisnis kian maju pesat. Hampir semua perusahaan dan lembaga pemerintah berusaha memperbaiki kualitas dan pengawasannya semaksimal mungkin dalam berbagai bidang. Begitu pula dalam hal peningkatan kualitas dan pengawasan bidang persediaan selalu diperlukan oleh perusahaan dagang maupun lembaga pemerintah. Dalam lembaga pemerintah, persediaan berupa persediaan *supplies* kantor dan persediaan jadi (Oktriyuono, 2010).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan menyebutkan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan persediaan merupakan proses pengolahan data barang yang terdapat di dalam suatu gudang. Sistem persediaan memiliki pengaruh besar terhadap suatu instansi karena sistem persediaan dapat membantu menyelesaikan masalah pengolahan data barang dan memudahkan pelaporan data barang yang tersedia. Salah satu contoh kegiatan persediaan yaitu pengelolaan persediaan obat, kegiatan ini biasa dilakukan oleh badan pelayanan kesehatan salah satunya yaitu Puskesmas (Amerta dkk, 2020).

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 43 Tahun 2019 adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya *promotif* dan *preventif* di wilayah kerjanya. Puskesmas berdasarkan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga sebagian besar dikelompokkan dalam organisasi sektor publik yang tidak berorientasi mencari keuntungan.

Puskesmas merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang beroperasi ditingkat kecamatan maupun kelurahan untuk memberikan pelayanan barang dan/atau jasa dan bertanggungjawab mengurus kesehatan di masyarakat tersebut. Dalam menjalankan aktifitasnya, Puskesmas juga bagian dari perangkat Pemerintah Daerah dengan status hukum tidak terpisah dari Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 412/DINKES/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Bukit Kapur kota Dumai, maka Puskesmas Bukit Kapur berstatus BLUD penuh. Terhitung mulai tanggal 05 Desember 2015 Puskesmas Bukit Kapur telah menjadi Puskesmas BLUD, sehingga Puskesmas dapat melakukan pengadaan obat menggunakan dana sesuai dengan pengelolaan keuangan BLUD.

Puskesmas dalam melakukan pengadaan obat atau alat kesehatan lainnya menggunakan dana yang berasal dari jasa layanan, hibah dan lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah. Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengelolaan Surplus Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Dumai yang menyebutkan bahwa pendapatan BLUD adalah pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hibah dan lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah.

Pendapatan BLUD berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan hasil kerjasama dengan pihak lain, maka selisih lebihnya dikelola sesuai dengan aturan penyelenggaraan APBD, APBN, dan perjanjian kerjasama dengan pihak lain. Surplus anggaran BLUD Puskesmas tercatat didalam laporan keuangan BLUD Puskesmas sebagai saldo awal. Surplus anggaran BLUD Puskesmas dapat dimanfaatkan seluruhnya untuk keperluan biaya operasional salah satunya biaya pelayanan pengadaan obat untuk persediaan obat, sehingga pada pelaksanaan pengelolaan persediaan obat di Puskesmas, kegiatan pengelolaan dapat berjalan sesuai dengan pengelolaan persediaan obat yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan.

Dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin aksesibilitas obat yang aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau, maka pemerintah melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.328/MENKES/IX/2013 tentang Formularium Nasional yang merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN seperti obat generik.

Berdasarkan Permenkes Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 Tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah, Obat-obatan yang terdapat pada sistem pengadaan secara elektronik telah mencakup semua item obat yang terdapat pada Formularium Nasional, baik itu berupa obat generik maupun obat paten. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan obat generik untuk kebutuhan pasien rawat jalan dan rawat inap dalam bentuk formularium. Sehingga menyediakan obat generik menjadi keharusan untuk setiap Puskesmas.

Puskesmas Bukit Kapur Kota Dumai merupakan Puskesmas yang terletak di Kecamatan Bukit Kapur berada dikawasan pintu masuk dan jalur lintas timur antara Dumai dan Pekanbaru. Dengan wilayah kerja jalur lintas provinsi menyebabkan area Puskesmas Bukit Kapur rawan akan pasien kecelakaan lalu lintas, dan mengharuskan pelayanan kesehatan Puskesmas Bukit Kapur baik dari segi sarana maupun prasarana yang optimal, disini masih terdapat kekurangan dalam sarana maupun prasarana sehingga terkadang mengharuskan

pasien kecelakaan lalu lintas dirujuk ke pelayanan Rumah Sakit (Puskesmas Bukit Kapur Kota Dumai, 2018).

Puskesmas Bukit Kapur merupakan Puskesmas yang berada di Kota Dumai dan ada 10 (sepuluh) Puskesmas lain yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan di Kota Dumai. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan tidak dapat memenuhi semua permintaan obat yang dilakukan oleh pihak Puskesmas, karena Dinas Kesehatan harus mendistribusikan obat untuk 10 (sepuluh) Puskesmas yang ada di Kota Dumai dan persediaan obat pada Dinas Kesehatan harus selalu ada untuk mencegah terjadinya keterlambatan pengiriman obat dari pemasok.

Keterbatasan obat tersebut menyebabkan pihak Puskesmas harus melakukan pengelolaan persediaan obat agar penyaluran obat ke pasien dapat berjalan dengan lancar, melihat dari total jumlah penduduk wilayah kerja Puskesmas Bukit Kapur tahun 2018 yang terdiri dari penduduk Kelurahan Bagan Besar dan Kelurahan Bukit Nenas adalah 21.947 jiwa, sehingga dengan jumlah penduduk tersebut, maka keterbatasan obat yang ada di Puskesmas harus di kelola dengan baik agar penyaluran obat kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Puskesmas Bukit Kapur Kota Dumai mempunyai jumlah pasien dari data yang tercatat pada tahun 2019 sebanyak 72.462 jumlah resep dan 23.105 jumlah pasien yang telah berkunjung dengan diberikan obat dan semuanya membutuhkan pelayanan kesehatan yang diserasikan dengan dukungan obat-obatan yang diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan tersebut Puskesmas memiliki bagian farmasi yang bertugas untuk menyediakan, mengelola, dan mendistribusikan obat-obatan yang dibutuhkan.

Data pasien yang tercatat menggambarkan rata-rata jumlah pasien yang dilayani setiap harinya oleh Puskesmas mencapai 63 pasien dan obat yang diberikan perharinya mencapai 198 obat. Hal ini menyebabkan besarnya tingkat perputaran obat-obatan yang ada pada Puskesmas, maka diperlukan adanya pengelolaan yang baik terhadap persediaan obat-obatan.

Pengendalian persediaan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah maupun perusahaan dagang. Termasuk keputusan-keputusan yang diambil sehingga kebutuhan akan bahan untuk keperluan

proses produksi, dapat terpenuhi secara optimal dengan resiko yang sekecil mungkin. Pengendalian persediaan juga dapat menggunakan salah satu metode pengendalian persediaan seperti model ABC, metode *economic order quantity*, *buffer stock/ safety stok* dan *Reorder Point*. Sehingga dapat diketahui apa yang harus disediakan, kapan harus memesan ulang untuk menambah persediaan dan berapa banyak yang harus dipesan, agar tidak terjadi kehabisan stok obat (Rizki,2015).

Petugas Apotek selaku pengelola persediaan obat yang ada di Puskesmas Bukit Kapur Kota Dumai, tidak mengetahui kapan titik dilakukannya permintaan obat kembali dan berapa banyak setiap obat harus disediakan agar persediaan obat pada Puskesmas tetap terpelihara. Hal ini disebabkan karena petugas Apotek pada saat melakukan perencanaan perhitungan kebutuhan obat, petugas Apotek tidak melakukan perhitungan sesuai prosedur yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan Kepmenkes RI No. 1121/Menkes/SK/XII/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan.

Petugas apotek dalam melakukan perencanaan perhitungan kebutuhan obat hanya sesuai perkiraan saja, jika kebutuhan pasien akan obat tersebut tinggi, maka petugas Apotek akan memperbanyak jumlah permintaan obat tersebut, dan jika kebutuhan pasien akan obat tersebut rendah, maka akan sedikit pula petugas apotek dalam melakukan permintaan obat tersebut. Oleh karena itu, Puskesmas Bukit Kapur Kota Dumai sebagai instansi pemerintah yang berorientasi pada pelayanan kesehatan masyarakat seharusnya melakukan pengelolaan persediaan obat sesuai dengan yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan.

Sehingga dengan melakukan pengelolaan persediaan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka petugas Apotek akan mengetahui kapan titik dilakukannya permintaan obat kembali dan berapa banyak jumlah obat yang akan direncanakan untuk persediaan obat pada Puskesmas. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, akan memberikan kontribusi dan manfaat secara berkelanjutan khususnya bagi Petugas Apotek Puskesmas Bukit Kapur Kota Dumai untuk meningkatkan pengelolaan persediaan obat agar persediaan obat

di Puskesmas tetap aman dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Puskesmas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan persediaan obat mulai dari perencanaan, permintaan, dan penerimaan persediaan obat dan bagaimana pengendalian persediaan obat pada Puskesmas Bukit Kapur Kota Dumai. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Persediaan Obat Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Bukit Kapur Kota Dumai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana prosedur pengelolaan persediaan obat mulai dari perencanaan, permintaan, dan penerimaan persediaan obat pada Puskesmas Bukit Kapur Kota Dumai?
- 2) Bagaimana Pengendalian Persediaan Obat Pada Puskesmas Bukit Kapur Kota Dumai?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih fokus dalam menggali permasalahan tentang prosedur pengelolaan persediaan obat mulai dari perencanaan, permintaan, dan penerimaan persediaan obat dan pengendalian persediaan obat pada Puskesmas Bukit Kapur Kota Dumai. Data obat yang diteliti merupakan data obat generik yang memiliki tingkat kebutuhan tertinggi sampai tingkat kebutuhan rendah berdasarkan data Lembar Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) pada tahun 2018 s/d 2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan persediaan obat mulai dari perencanaan, permintaan, dan penerimaan persediaan obat pada Puskesmas Bukit Kapur Kota Dumai
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pengendalian persediaan obat pada Puskesmas Bukit Kapur Kota Dumai

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

- 1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman, serta sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada waktu perkuliahan dalam mencari permasalahan sesungguhnya dengan terjun langsung kelapangan mengenai analisis sistem akuntansi persediaan obat untuk mengelola keterbatasan obat pada Puskesmas Bukit Kapur di Kota Dumai.

- 2) Bagi Pihak Puskesmas Bukit Kapur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan masukan bagi Petugas Apotek Puskesmas Bukit Kapur untuk perbaikan atas penerapan pengelolaan persediaan obat.

- 3) Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi D-IV Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian per bagian pada laporan skripsi yang disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, asumsi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSAKA

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum Puskesmas Bukit Kapur, struktur organisasi, penyajian data, dan pembahasan mengenai topik yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran.